

Implementasi pasal 95 UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kawasan Barito Kota Semarang

Oleh:

Wahyu Pradana A, Nina Widowati

Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Fax (024) 7465405

ABSTRACT

This research aims to describe implementation article 95 of law no. 1 year 2011 About Housing and the permukiman in the area of the Barito Semarang city and to know the factors that hinder the implementation of article 95 of law No. 1 of 2011. Locus was used in this research is in the area of JL. Barito Camel City Of Semarang. This research uses qualitative research methods are descriptive.

Implementation of article 95 of law no. 1 year 2011 About housing and residential areas in the region of the Barito Semarang city still encountered obstacles. Factors restricting implementation include: factors of poverty, low level of employment, the most expensive place to live, there is a group of people that rule the slum areas or wild.

Conclusions in this study are implementation article 95 of law no. 1 year 2011 About Housing and the permukiman in the area of the Barito Semarang city, still encountered obstacles primarily viewed from many residents who still live in the wild, the existence of a settlement of a pile of garbage that exist around the settlements of the wild and the existence of illegal karaoke. Based on these conclusions, the researchers recommend to the Government in order to provide training to the residents of the settlement of wild creativity to be able to work mengasilkan that can be used as income.

A. LATAR BELAKANG

Permasalahan permukiman kumuh sudah sejak lama dikaji, baik oleh pemerintah, perguruan tinggi, swasta, maupun masyarakat. Kata “kumuh” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kotor atau cemar. Jadi, bukan padat, rapat becek, bau, atau tidak teraturnya, tetapi justru kotornya yang menjadikan sesuatu dapat dikatakan kumuh. Beberapa penelitian tentang permukiman kumuh yang sudah dilakukan di Indonesia, (Ruhaida dan Sunarti, 2012;

Eni Endang Surtiani, 2006; Junaedi Mulyo Prayidno, 2007; Ngakan PutuSueca, 2004; Ety Soesilowati, 2007), ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya permukiman kumuh. Bahwa, keadaan geografis dapat mempengaruhi kualitas lingkungan, serta jumlah penduduk yang tinggi mempengaruhi jumlah lahan atau hunian tempat tinggal. Itulah beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya permukiman kumuh di Indonesia. Dari beberapa faktor tersebut ada yang belum banyak diteliti, yaitu terkait implementasi kebijakan pemerintah

yang tidak tegas dan mudah diabaikan masyarakat.

Semarang sebagai kota besar yang ada permukiman kumuh juga. Kota yang mempunyai kepadatan penduduk tinggi, yaitu pada tengah tahun 2011 berjumlah 936.058 jiwa yang terdiri dari laki-laki 461.121 jiwa dan perempuan 474.937 jiwa. Jumlah tersebut naik 0,25 persen dari akhir tahun 2010.

Pada tahun 2008, sebaran permukiman kumuh di Kota Semarang paling besar adalah di Kelurahan Kalibanteng Kulon Kecamatan Semarang Barat yaitu jumlah lokasi permukiman kumuh sebanyak 8 lokasi, dengan luas lokasi permukiman kumuh kurang lebih 2Ha, jumlah bangunan kumuh sebanyak 112 unit serta jumlah keluarga di rumah kumuh adalah 112 KK (ciptakarya.pu.go.id). Selain itu, data Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) menunjukkan jumlah pembangunan kawasan permukiman kumuh dan tingkat pencemaran mencapai 46%. Luas permukiman kumuh di tahun 2010 adalah 620 Ha dan pada tahun 2011 seluas 594,2 Ha (LKPI Kota Semarang, 2011). Sebenarnya Pemerintah Kota Semarang sejak tahun 1991 mulai melakukan pembenahan beberapa kawasan kumuh dan liar dengan cara memindahkan penduduk ke lokasi yang aman dan juga layak huni, meskipun awal pemindahan tidak banyak. Dalam kasus-kasus tertentu, proses *resettlement* berusaha meningkatkan kesejahteraan para pemukim baru, meminimalkan ketegangan dengan komunitas asli dan mengurangi ketergantungan terhadap pemukim yang terlebih dahulu ada. Akan tetapi kebanyakan yang terjadi sebaliknya dimana justru semakin memiskinkan sebagian besar mereka yang dipindahkan, ketergantungan semakin meningkat karena mata pencahariannya hilang (Etty Soesilowati, 2007).

Banjir Kanal Timur di kawasan Barito yang dibangun bertujuan untuk mengatasi banjir di kawasan Semarang, menjadi beralih fungsi. Salah satunya

adalah munculnya pemukiman-pemukiman ilegal yang dibangun di sepanjang jalur sungai banjir kanal timur yang tepatnya berada di jalan Unta Raya. Faktor yang mendorong munculnya bangunan ilegal tersebut akibat keterbatasan ekonomi dan keadaan sosial yang kurang mendukung. Lapisan penduduk marjinal di kawasan sungai banjir kanal timur ini dengan terpaksa dan atau sengaja bermukim di hunian kumuh. Di antara mereka bahkan mendirikan bangunan-bangunan liar pada lokasi-lokasi yang semestinya tidak diperuntukan sebagai permukiman atau pada lahan-lahan milik pihak lain. Selain itu, kawasan Barito merupakan kawasan yang dibangun untuk mengatasi banjir akibat hujan lokal dan permukiman kumuh yang berdiri di sekitar bantaran sempadan sungai dapat membahayakan keselamatan masyarakat pemukim.

Selain karena permukiman kumuh yang berdiri di sekitar bantaran sempadan sungai, landasan hukum yang mengatur tentang permukiman sudah sejak dulu ada yaitu pasal 95 UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berisi tentang pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru. Disamping itu, persoalan permukiman kumuh tetap muncul dan sulit diatasi oleh pemerintah Kota Semarang. Oleh karena itu persoalan permukiman kumuh sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dengan menyadari permasalahan ini, peneliti mengambil judul mengenai “**Implementasi pasal 95 UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kawasan Barito Kota Semarang**”

B. TUJUAN

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pasal 95 UU No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kawasan Barito Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi pasal 95 UU No 1 tahun

2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kawasan Barito kota Semarang.

C. TEORI

Grindle (Winarno, 2008: 101) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sementara itu, Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2008: 101) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Grindle (Winarno, 2008: 101) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Model Merilee S Grindle (Nugroho, 2003: 134) model Grindle isi kebijakan di tentukan oleh konters implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan di formulasikan, perubahan implementasi dilakukan. Keberhasilannya di tentukan oleh derajat implementasi dari kebijakan tersebut isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- a) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- b) Jenis manfaat yang akan di hasilkan.
- c) Derajat perubahan yang di inginkan.
- d) Kedudukan pengambilan keputusan.
- e) (Siapa) pelaksana program.
- f) Sumberdaya yang di kerahkan.

Sementara itu konteks impementasi adalah :

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa.
3. Kepatuhan dan daya tangap.

D. METODELOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2009: 11) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sasaran yang tepat, sifat-sifat individu, keadaan gejala-gejala dari kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala-gejala yang lain dalam masyarakat (objek penelitian).

Penelitian kualitatif deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan latar dan interaksi yang kompleks dari partisipan serta variabel-variabel menurut pandangan dan definisi partisipan. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status variabel, gejala, atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Focus dari implemenetasi pasal 95 UU no 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan premukiman dan mengambil locus di Kawasan Barito Sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang Kota Semarang tepatnya di jalan Unta Raya.

Teknik pemilihan informan yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *snowballing* dimana pertama peneliti menentukan satu orang untuk dijadikan informan, kemudian selanjutnya orang tersebut yang akan menunjuk orang lain untuk kita jadikan informan. Begitu seterusnya, sampai data atau informasi yang diperoleh dirasa sudah cukup oleh peneliti.

E. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan pasal 95 UU no 1 Tahun 2011 Perumahan dan Kawasan permukiman

Dari hasil penelitian dilapangan, sebenarnya pemukiman liar dan kumuh

yang berdiri di sepanjang jl. Unta Raya Kota Semarang sudah mulai berkurang dan sudah ada beberapa bangunan liar yang telah dibongkar. Berdirinya pemukiman liar dan kumuh di daerah tersebut sangat meresahkan bagi warga sekitar yang tinggal di sebuah perumahan atau kompleks yang tidak jauh dari lokasi berdirinya pemukiman liar. Keributan yang ditimbulkan dari berdirinya pemukiman kumuh dan liar salah satunya adalah berdirinya karaoke liar dan pijat. Banyak pelanggan karaoke yang sering berkelahi dan hal tersebut sangat mengganggu kenyamanan warga yang berada di kompleks perumahan. Selain mengganggu kenyamanan warga sekitar, berdirinya pemukiman kumuh juga mengganggu kebersihan Sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang.

Warga yang tinggal di pemukiman liar mayoritas lebih memilih membuang sampah di Sungai Banjir Kanal Timur daripada membuang sampah di TPS yang sudah ada. Selain itu berdirinya pemukiman kumuh juga berbahaya bagi warga yang tinggal di permukiman. Listrik yang digunakan oleh warga di permukiman liar tidak menggunakan meteran listrik, tetapi mengambil listrik langsung dari tiang listrik sekitar. Menggunakan listrik langsung dari tiang listrik tanpa adanya meteran listrik dari PLN sangat membahayakan, karena dapat menyebabkan konsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. Dari fenomena yang terlihat di lapangan, bahwa implementasi pasal 95 UU no 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman di Kawasan Barito Kota Semarang masih adanya kendala. Buktinya masih banyaknya warga permukiman liar yang masih tinggal di lokasi tersebut, masih banyaknya tumpukan sampah yang berserakan khususnya yang berada di tepian sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang.

2. Pihak yang kepentingan dipengaruhi

Jenis kebijakan publik yang dibuat akan membawa dampak tertentu terhadap

macam kegiatan politik. Dengan demikian, apabila kebijakan publik dimaksud untuk menimbulkan perubahan-perubahan dalam hubungan sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya, akan dapat merangsang munculnya perlawanan dari pihak-pihak yang kepentingannya terancam oleh kebijakan publik tersebut.

a. Masyarakat Pemukim

Kebijakan yang akan ditetapkan tentu akan berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat menjadi obyek implementasi. Penertiban permukiman kumuh di jl. Unta Raya Kota Semarang. Kebijakan tersebut akan membuat masyarakat yang tinggal di tempat tersebut akan kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Tempat tersebut adalah tempat satu – satunya yang bisa masyarakat pemukim tempati, karena mereka datang dari desa yang tidak lagi mempunyai tempat tinggal sendiri di desa mereka. Begitu juga dengan mata pencaharian mereka yang akan terenggut. Karena pada dasarnya mata pencaharian mereka sebagian besar berprofesi sebagai pemulung yang lokasinya berdekatan dengan pasar suku cadang perbengkelan serta perumahan- perumahan.

b. Masyarakat Sekitar

Sebenarnya kebijakan penertiban permukiman kumuh atau liar yang berada di jl. Unta Raya Kota Semarang akan sangat menguntungkan bagi masyarakat sekitar yang berada di seberang jalan permukiman kumuh tersebut. Terdapat gangguan yang masyarakat sekitar rasakan pada saat malam hari, karena adanya hiburan malam yaitu karaoke liar yang meresahkan warga sekitar karena kebisingan serta kegaduhan.

3. Jenis manfaat yang dapat diperoleh

Program yang memberikan manfaat secara kolektif atau terhadap banyak orang akan lebih mudah diimplementasikan karena sangat mudah untuk memperoleh dukungan dan tingkat kepatuhan yang tinggi. Indikator yang digunakan untuk mengetahui jenis manfaat yang dapat diperoleh yaitu sebagai berikut :

a. Manfaat kebijakan bagi Pemerintah Kota

Dari hasil penelitian melihat manfaat yang dapat diperoleh dari kebijakan penertiban permukiman kumuh dan liar di jl. Unta Raya Kota Semarang adalah area sekita Banjir Kanal Timur Kota Semarang menjadi lebih tertata karena tidak terdapat bangunan yang berada di sepadan sungai Banjir Kanal Timur.

b. Manfaat Kebijakan bagi masyarakat sekitar

Hasil penelitian melihat dengan adanya penertiban tersebut, masyarakat sekitar menjadi lebih nyaman dan damai karena tidak terganggu dengan kebisingan dan kegaduhan di malam hari.

4. Jangkauan perubahan yang dapat diharapkan

Program yang bersifat jangka panjang dan menuntut perubahan perilaku masyarakat dan tidak secara langsung atau sesegera mungkin dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat cenderung lebih sulit diimplementasikan. Indikator yang digunakan untuk mengetahui jangkauan perubahan yang diharapkan yaitu sebagai berikut :

a. Perubahan yang diharapkan Pemerintah Kota

Setiap perubahan pasti ingin selalu menjadi lebih baik, begitu juga dengan perubahan yang diharapkan pemerintah Kota Semarang. Dari hasil penelitian, pemerintah berharap agar area Banjir Kanal Timur dapat netral dari bangunan liar yang mengganggu. Agar kedepannya dapat dijadikan objek wisata malam dengan taman.

b. Perubahan yang diharapkan Masyarakat sekitar

Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa masyarakat sekitar sangat ingin agar permukiman liar yang ada di jl. Unta Raya dapat segera di tertibkan. Karena ketenangan warga yang

tinggal disekitar menjadi terganggu karena kebisingan dan kegaduhan karaoke yang ada di sekitar permukiman liar.

5. Kedudukan pengambil keputusan

Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam implementasi kebijakan publik, baik secara geografis maupun organisatoris, akan semakin sulit pula implementasi program. Karena semakin banyak satuan- satuan pengambil keputusan yang ada didalamnya.

a. Keterlibatan Pemerintah Kota

Keterlibatan pemerintah kota sangat berpengaruh untuk kesuksesan implementasi kebijakan. Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa pemerintah kota dalam hal ini Dinas Tata Kota akan bergerak jika sudah ada surat atau laporan dari masyarakat terkait permasalahan permukiman liar yang berada di jl. Unta Raya Semarang. Seperti yang dituturkan oleh informan ke 1 : Dinas Tata Kota akan bertindak, jika sudah ada surat edaran dari masyarakat atau keluhan masyarakat (Wawancara tanggal 25 Agustus 2015)

b. Keterlibatan Perangkat Daerah

Dari hasil penelitian, keluaran panduan lamper kota semarang selalu siap untuk membantu pemerintah kota, jika akan diadakan penertiban permukiman liar.

6. (Siapa) pelaksana program

Kemampuan pelaksana program akan mempengaruhi keberhasilan implementasi program tersebut.

Stakeholder yang terlibat dalam kebijakan ini yaitu sebagai berikut :

a. Aparatur Pemerintah

Dari hasil penelitian, pelaksana program dalam kasus penertiban atau penertiban permukiman liar atau kumuh pemerintah dalam hal ini Dinas Tata Kota akan dibantu oleh TNI, Polisi, Satpol PP dan kelurahan.

b. Masyarakat sekitar

Keterlibatan masyarakat sekitar sangat diharapkan untuk membantu penertalisan, karena dukungan warga sekita sangat diharapkan pemerintah kota. Mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar merupakan salah satu pendorong keberhasilan implementasi.

7. Sumberdaya yang di kerahkan

Tersedianya sumber- sumber secara memadai akan mendukung keberhasilan implementasi program atau kebijakan publik. Setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia, sumber daya financial, dan sumber daya waktu.

Indikator yang digunakan untuk mengetahui ketersediaan sumber daya adalah :

a. Sumberdaya manusia

Dari hasil penelitian, sumber daya manusia yang dikerahkan dalam proses penertalisan adalah peran pemerintah kota yang dibantu TNI, Polisi dan Satpol PP.

b. Sumberdaya finansial

Dari hasil penelitian, sumber finansial yang dikeluarkan untuk penertiban permukiman kumuh antar lain, biaya bahan bakar truk pengangkut, biaya bahan bakar alat berat dll.

8. Strategi aktor - aktor yang terlibat

Strategi, sumber dan posisi kekuasaan dari implementor akan menentukan keberhasilan implementasi suatu program. Apabila kekuatan politik merasa berkepentingan terhadap suatu program, mereka akan menyusun strategi guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi, sehingga output suatu program akan dapat dinikmati. Indikator yang digunakan untuk mengetahui strategi dan kekuasaan implementor adalah :

a. Strategi implementasi kebijakan

Dari hasil penelitian, strategi yang diterapkan adalah dengan sosialisasi dan mencari ketua dari sekelompok orang yang melindungi daerah tersebut.

Jika ketua dari sekelompok orang tersebut sudah di amankan. Maka, pada saat penertiban nanti akan lebih lancar karena tidak ada dalang keributan.

b. Pemecahan masalah

Dari hasil penelitian, hampir semua warga yang tinggal dipermukiman tidak memiliki KTP kota semarang karena memang bukan warga semarang yang sah. Oleh sebab itu akan sangat susah dalam melakukan penertiban karena tidak ada pemindahan hunian baru. Hal ini yang membuat penertiban berjalan sangat lambat lambat. Jalan yang ditempuh jika sudah dilakukan penertiban, pemukim yang tinggal di pemukiman liar dipaksa harus pergi mencari tempat tinggal sendiri atau dengan saran pemerintah tinggal di rumah susun.

9. Karakteristik lembaga dan penguasa

Implementasi suatu program tentu akan mendatangkan konflik pada kelompok-kelompok yang kepentingannya dipengaruhi. Penyelesaian konflik akan menentukan who get what atau “siapa mendapatkan apa”. Strategi bagi penyelesaian konflik dapat secara tidak langsung menilai ciri- ciri rejim dan institusi dimana suatu program diimplementasikan. Apakah program berada pada lingkungan yang otoriter atau demokratis. Dalam era demokrasi di Indonesia setiap kebijakan yang diimplementasikan harus adil. Indikator yang digunakan untuk melihat karakter lembaga adalah :

a. Komunikasi antar lembaga pemerintahan

Komunikasi yang baik akan terjalin hubungan yang baik, dari hasil penelitian. Komunikasi antara pemerintah kota dengan aparaturnya daerah masih kurang baik. Salah satu aparaturnya daerah yaitu informan ke 4 menyatakan bahwa:

“Untuk menertipkan pemukiman liar tersebut sumber dana diperoleh dari APBD, tetapi menunggu setelah pemilu 2014 baru bisa diimplementasikan”.

(Wawancara tanggal 23 Januari 2013)

Sedangkan salah satu pegawai pemerintah kota Semarang sebagai informan ke 2 mengatakan bahwa :

“Untuk penertiban sendiri masih belum dapat dipastikan”.

Dari kedua informan terjadi miss komunikasi, hal tersebut membuktikan kenapa komunikasi antar lembaga masih belum baik.

b. Koordinasi antar lembaga pemerintahan

Dari hasil penelitian, koordinasi dari lembaga pemerintah yang ada sudah cukup baik yaitu itu Dinas Tata Kota, Polisi, Satpol PP ataupun kelurahan setempat. Pihak kelurahan yang bersangkutan mengaku akan selalu siap, jika dibutuhkan oleh Dinas Tata Kota Semarang.

10. Kepatuhan dan daya tanggap

Agar tujuan program dalam lingkungan khusus dapat tercapai maka para implementor harus tanggap terhadap kebutuhan- kebutuhan dari beneficiaries. Tanpa daya tanggap yang cukup selama implementasi, implementor akan kehilangan informasi untuk mengevaluasi pencapaian program dan kehilangan dukungan yang penting bagi keberhasilan implementasi. Indikator yang digunakan dalam melihat kepatuhan dan daya tanggap adalah :

a. Ketersediaan Sarana dan prasarana

Dari hasil penelitian, karena hampir semua warga yang tinggal di permukiman kumuh tidak memiliki KTP kota Semarang. Maka tidak ada kompensasi mengenai hunian baru dari pemerintah. Pemerintah hanya menyediakan rumah susun bagi warga yang memiliki KTP kota Semarang. Sehingga warga yang tidak mempunyai KTP terpaksa harus mencari tempat tinggal sendiri.

b. Pemeliharaan sarana dan prasarana

Dari penelitian dilapangan peneliti menemukan berbagai macam sampah yang

berserakan di belakan permukiman liar yang berada tepat di sepadan sungai Banjir Kanal Timur. Akibatnya, sampah sering berterbangan dan hanyut di sungai yang berakibat terjadi tumpukan sampah. Padahal sudah ada tempat pembuangan sampah yang berada diantara permukiman liar. Hal ini merupakan tugas pemerintah untuk melakukan pemeliharaan bagi sungai Banjir Kanal Timur.

11. Faktor- faktor yang menghambat implementasi di kawasan permukiman liar yang berada di jl. Unta raya antara lain sebagai berikut :

1. Faktor kemiskinan
2. Rendahnya lapangan pekerjaan
3. Kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat yang tinggal di permukiman liar
4. Mahalnya tempat tinggal
5. Adanya sekelompok orang yang menguasai dan melindungi daerah tersebut
6. Masyarakat yang tinggal di permukiman sudah terlanjur nyaman tinggal di daerah tersebut

1) Faktor Kemiskinan

Faktor kemiskinan sudah menjadi syarat wajib pada permasalahan yang berkaitan dengan permukiman liar ataupun kumuh. Kemiskinan mendorong terbentuknya permukiman – permukiman yang tidak berizin yang banyak dijumpai di kota- kota besar Indonesia. Keterbatasan uang menjadi alasan seseorang mendirikan bangunan semi permanen yang khususnya bagi orang- orang yang berpindah dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan, akan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan yang layak saat tiba dikota. Begitu juga yang terjadi di Semarang, banyak orang – orang dari bergai daerah di Jawa Tengah yang datang ke Semarang untuk mencari lapangan pekerjaan. Ada yang dari boyolali, kudus, Solo, Kendal, Pati, dsb. Pada akhirnya

hanya bisa berdomilisi di jl. Unta Raya Semarang di tepi Sungai Banjir Kanal Timur yang pada dasarnya dibangun untuk mengatasi banjir di Kota Semarang. Seperti yang diungkapkan informan ke 5 :

“Jaman sekarang cari pekerjaan susah, bisa makan saja sudah bersyukur”.

2) Rendahnya Lapangan pekerjaan

Di kota besar lapangan pekerjaan menjadi daya tarik bagi masyarakat, terlebih bagi masyarakat desa. Banyak orang-orang berbondong-bondong datang ke kota hanya untuk mencari lapangan pekerjaan. Fenomena tersebut juga terjadi di Kota Semarang, banyak dari masyarakat desa yang datang ke kota Semarang untuk mencari lapangan pekerjaan. Akan tetapi dengan jumlah kepadatan penduduk yang datan dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada tidak sebanding. Hal tersebut membuat jumlah pengangguran meningkat dan dampaknya banyak masyarakat khususnya yang berpendidikan rendah tetap menetap di Kota Semarang dengan mencari pekerjaan apa adanya. Akhirnya dengan minimnya pendidikan dan keahlian yang pas-pasan profesi yang dipilih adalah sebagai pemulung. Seperti yang diungkapkan informan ke 6 :

“Dulu ke Semarang ingin mencari pekerjaan, tapi dengan pendidikan yang pas-pasan dan jumlah lapangan pekerjaan yang sedikit mau tidak mau sekarang menjadi pemulung membantu suami”.

3) Kurangnya Sosialisasi Pemerintah

Sosialisasi merupakan syarat wajib untuk melancarkan jalanya suatu kebijakan. Pemerintah yang

dekat dengan masyarakat akan mendapatkan dukungan yang baik dari masyarakat. Sebaliknya jika pemerintah kurang dekat dengan masyarakat akan terhambat dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Kurangnya sosialisasi di permukiman liar yang berada di jl. Unta raya menjadi salah satu sebab lambatnya penetrasian permukiman liar yang berada di tepi Sungai Banjir Kanal Timur. Seperti yang diungkapkan informan ke 6 :

“Kita sendiri juga jarang diberikan arahan oleh pemerintah, tau tau mendapat kabar jika akan digusur”

Sosialisasi merupakan tahap yang paling krusial dalam implementasi kebijakan. Dengan pendidikan masyarakat yang notabeni lulusan SMP, pemerintah harus dengan sabar dan berhati-hati. Berbicara dengan masyarakat berpendidikan rendah akan berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat berpendidikan tinggi atau lulusan sarjana. Oleh sebab itu pemerintah harus mencari cara yang jitu untuk mendekati masyarakat disekitar permukiman. Terhambatnya penetrasian di jl. Unta Raya tidak lepas dari penolakan masyarakat yang tinggal di permukiman liar.

4) Mahalnya tempat hunian

Harga mahal untuk tempat hunian menjadi fenomena nyata di Kota Besar Indonesia, tidak terkecuali di Kota Semarang. Berprofesi sebagai pemulung dengan kehidupan pas-pasan akan sangat sulit untuk menyewa rumah apalagi harus membeli sebuah rumah. Dengan alasan tersebut masyarakat yang tinggal di permukiman liar tidak mau meninggalkan daerah tersebut. Seperti yang diungkapkan informan ke 5 :

“Jaman sekarang sewa rumah juga mahal, apalagi beli rumah. Jadi mau gak mau tetap tinggal disini”.

5) Adanya Sekelompok orang yang menguasai dan melindungi daerah tersebut

Faktor penghambat selanjutnya yang hampir disemua permasalahan permukiman liar ada adalah adanya sekelompok orang tertentu yang menguasai dan melindungi daerah permukiman liar. Sekelompok orang tersebut berkaitan erat dengan preman yang telah menguasai daerah permukiman liar. Oleh sebab itu pemerintah harus mempunyai rencana yang baik dengan mendekati pemimpin dari kelompok tersebut agar upaya penetralisasian berjalan lancar. Seperti yang diutarakan oleh informan ke 2 :

Mencari bantongan preman yang melindungi area pemukiman liar tersebut. Kalau bantongan premanya sudah di pegang, maka bawahan preman sudah tidak bisa memberontak lagi.

(Wawancara tanggal 25 Januari 2013)

6) Masyarakat yang tinggal di permukiman sudah terlanjur nyaman

Banyaknya warga yang tinggal di permukiman kumuh atau liar yang berasal dari berbagai daerah seperti boyolali, kudu dan pati yang sudah mendiami permukiman liar dalam jangka waktu lebih dari 4 tahun. Seperti yang dikatakan informan ke 6 :

“Saya sudah tinggal disini sekitar 4 tahunan bersama keluarga dan saudara. Jadi sudah terlalu nyaman tinggal disini”.

Tinggal disebuah rumah selama lebih dari 4 tahun akan membuat orang menjadi nyaman dan

betah, seperti yang dialami warga yang tinggal dipermukiman kumuh atau liar.

F. PENUTUP

a) Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pasal 95 UU no 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman di Kawasan Barito Kota Semarang yang tepatnya di jl. Unta Raya Kota Semarang, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pasal 95 UU no 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman di Kawasan Barito Kota Semarang cenderung lambat dan masih menemui kendala. Kendalanya antara lain :

1. Masih banyaknya warga yang tinggal dipemukiman liar.
2. Adanya tumpukan sampah di dekat Sungai Banjir Kanal Timur.
3. Masih berdirinya karaoke liar yang meresahkan warga yang tinggal di luar pemukiman liar.

Dari hasil penelitian, penulis juga melihat adanya beberapa faktor penghambat implementasi mengenai pasal 95 UU no 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman di Kawasan Barito Kota Semarang antara lain sebagai berikut :

1. Faktor kemiskinan
2. Rendahnya lapangan pekerjaan
3. Kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat yang tinggal di permukiman liar
4. Mahalnya tempat tinggal
5. Adanya sekelompok orang yang menguasai dan melindungi daerah tersebut
6. Masyarakat yang tinggal di permukiman sudah terlanjur nyaman tinggal di daerah tersebut

b) Saran

Masih adanya beberapa kendala yang muncul di pemukiman liar, oleh sebab itu pemerintah kota Semarang dalam hal ini adalah Dinas Tata Kota agar dapat segera memperbaiki permasalahan yang muncul dalam kaitan dengan pemukiman liar yang berada di jl. Unta Raya Kota Semarang. Penulis mempunyai saran untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada di pemukiman liar sebagai berikut :

1. Kaitanya dengan angka kemiskinan di Kota Semarang dan masih rendahnya lapangan pekerjaan yang ada, sebenarnya ada beberapa alternatif yang perlu dicoba untuk mendorong perekonomian warga yang tinggal di pemukiman liar. Pada dasarnya mayoritas warga yang tinggal di pemukiman liar adalah sebagai pemulung, pemerintah Kota Semarang dapat memberikan pelatihan – pelatihan kreatif dari sebuah barang bekas, agar warga mendapatkan ilmu yang dapat dikembangkan menjadi sebuah produk jual yang dapat menolong warga dari himpitan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Moleong, Lexy. 2005. *Metodologi Kualitatif* Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit Unpad.

Winarno, Budi, 2007, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Jakarta, Media Pressindo.

Non-Buku

Eni Endang Surtiani, 2006. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terciptanya Kawasan Permukiman Kumuh di Kawasan Pusat Kota (Studi Kasus: Kawasan Pancuran, Salatiga). *Tesis*. Universitas Diponegoro.

Juaedi Mulyo Prayidno, 2007. Upaya Pemerintah Kota Semarang Dalam Mengatasi Pemukiman Kumuh (*Slum Area*) (Studi Pada Dinas Tata Kota dan Permukiman). *Disertasi*. Universitas Diponegoro.

Ngakan Putu Sueca, "Permukiman Kumuh Masalah atau Solusi?", *Jurnal Permukiman Natak*, Vol. 2, No. 2 Agustus 2004 : 56 – 107.

Soesilowati, Etty, "Perumahan dan Permukiman Kumuh Bagi Masyarakat Urban di Kota Semarang", *Jurnal Kebijakan*, Vol 1, N.o 2 Agustus 2007.

Ruhaida dan Sunarti, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas Permukiman Kumuh pada Kegiatan PNPM di Kelurahan Muarareja Kota Tegal", *Jurnal Teknik PWK*; Vol. 1; No. 1; 2012.

LKPJ Kota Semarang 2011

http://semarangkab.go.id/utama/storage/IL_PPD_TH_2011.pdf, 14 april 2011.

http://ciptakarya.pu.go.id/kumuh/main.php?module=detil_artikel&id=32, 18 april 2011.